

# Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020

Drajat Armono<sup>1\*)</sup>, Nur Widiyaningsih<sup>2)</sup>, Nurhayanto<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Islam Indonesia

<sup>2)</sup>Universitas Islam Indonesia

<sup>3)</sup>Universitas Amikom Yogyakarta

<sup>\*)</sup>Corresponding author & e-mail: [046110409@uii.ac.id](mailto:046110409@uii.ac.id)

**Abstract** The budget is an important tool in public sector organization as well as in the private sector, because the budget is used as a measuring tool or performance appraisal to be achieved in the future and is expressed in numbers. Therefore, this study aims to determine and measure the level of efficiency and effectiveness of the local government's performance of the Department of Cooperatives, UMK, UM and Metro City Industry in realizing the budget starting from the 2017-2020 period. This study uses the Budget Realization Report obtained from the object of research. The result of this study conclude that the calculation of the average use of the budget is quite effective and efficient. The use of the budget is said to be successful if the realization does not exceed the budgeted figure.

**Keywords:** Budget, Efficiency, Effectiveness, Performance Measurement

**Abstrak** Anggaran merupakan suatu alat terpenting dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam suatu organisasi sektor publik, pasalnya anggaran digunakan sebagai alat ukur atau penilaian kinerja yang hendak dicapai kedepannya dan dinyatakan dalam angka. Berdasar hal tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur seberapa tingkat efisien serta efektivitas kinerja pemerintah daerah Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro dalam merealisasikan anggaran yang dimulai dari periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan rata-rata penggunaan anggaran dinyatakan cukup efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dikatakan baik apabila realisasi tidak melebihi jumlah angka yang dianggarkan.

**Kata Kunci:** Anggaran, Efisiensi, Efektifitas, Pengukuran Kinerja

\*Corresponding author. Address: Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta. E-mail addresses: [drajatarmono@gmail.com](mailto:drajatarmono@gmail.com); [046110409@uii.ac.id](mailto:046110409@uii.ac.id) Telephone number: +628122950162.

## I. PENDAHULUAN

Keputusan era baru menjadikan perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia berjalan begitu pesat, setelah diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah diharuskan dapat mengelola keuangan daerah dengan secara mandiri dalam suatu sistem Negara. Sesuai pengertian dari akuntansi sektor publik yang merupakan sebuah sistem pencatatan akuntansi organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintahan serta instansi-instansi dibawahnya yang merupakan bagian dari sistem perekonomian negara dengan tujuan tidak mencari laba, akan tetapi mensejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah berbunyi penjelasan, "otonomi daerah adalah wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam

sistem pemerintahan daerah diberi kebebasan dalam pengelolaan keuangan termasuk menyusun urusan wajib disetujui pemerintah daerah seperti halnya penyusunan anggaran. Anggaran merupakan perencanaan keuangan digunakan untuk masa depan yang penggunaannya dalam jangka waktu satu tahun dan disajikan dalam ukuran finansial. Untuk memulainya dalam penyusunan anggaran langkah utama dimulai dari menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu dalam sebuah rancangan peraturan yang sifatnya umum sudah termasuk bagian dari peraturan anggaran sehingga menjadikan gambaran dalam perencanaan operasional keuangan pemerintah daerah. APBD adalah rancangan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dibuat pada periode waktu tertentu guna dijadikan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan serta penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasilan guna untuk menutup pengeluaran (Abdul Halim, 2012). LRA merupakan laporan yang berisi informasi penyusunan mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang kemudian dibandingkan dengan ketiga pos tersebut.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 24 Tahun 2016 BAB II Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro menjelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian. Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa yang dimaksud urusan wajib diperangkat daerah ialah Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian penulis tertarik dengan judul penelitian Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. Sehingga perlu dilakukan analisis dalam pelaksanaan urusan wajib mengenai realisasi anggaran pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian dari objek penelitian tersebut. Tujuannya supaya pengalokasian dana tepat pada sasaran atau belum berdasarkan kebutuhan yang terjadi, dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas.

## II. LANDASAN TEORI

### **Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi: 2014, menjelaskan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

### **Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik**

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut penjelasan Sujarweni 2015:1 dalam Muhammad Agung Pratama 2021, mengatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang prosesnya melakukan pencatatan, mengklasifikasikan serta melaporkan semua kegiatan transaksi yang nantinya dijadikan sebuah informasi keuangan oleh pengambil keputusan sesuai penerapan pada pengelolaan dana publik.

### **Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta**

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber Pendanaan	pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	<i>Cash Accounting</i>	<i>Accrual Accounting</i>

Sumber: (Mardiasmo: 2016)

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penjelasan dari Abdul Halim, 2014, mengatakan laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Laporan tersebut yang digunakan menjadi pertanggungjawaban disetiap pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya yang disebut dengan laporan anggaran.

### APBD

Pengertian APBD menurut Abdul Halim, 2012, mendefinisikan APBD sebagai rencana operasional keuangan daerah, sebagaimana pemerintah daerah menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah dalam satu periode tahun anggaran yang telah disetujui pihak yang berwenang (DPRD).

### Pengertian Anggaran

Berdasarkan definisi anggaran menurut Noratika dkk, 2016 dalam Sulistyawati menjelaskan bahwa anggaran merupakan pengungkapan dari penilaian kinerja dilakukan pada suatu organisasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam angka. Dalam lembaga organisasi sektor publik, anggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

### Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo, 2015 dalam Muhammad Agung Pratama 2021 terdapat jenis-jenis anggaran dibagi menjadi dua:

1. Anggaran operasional, anggaran operasional merupakan suatu anggaran digunakan untuk rencana kebutuhan pemerintah yang dipakai sehari-hari guna mengerjakan berbagai program atau kegiatan pemerintahan. Anggaran operasional terdiri dari belanja rutin atau belanja operasi yang penggunaannya hanya untuk satu tahun.
2. Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan beberapa rencana kerja dan pembelanjaan seperti untuk kebutuhan pengeluaran pada aset tetap, memiliki sifat jangka panjang atau manfaatnya lebih dari satu periode.

### Laporan Realisasi Anggaran

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang berisikan sumber dan alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Pada dasarnya dalam organisasi sektor publik laporan realisasi anggaran dianggap penting karena menggambarkan seberapa besar angka yang akan dicapai dalam memenuhi target-target yang akan dilaksanakan dan sudah mendapat persetujuan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

### Akuntansi Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014) menjelaskan belanja pemerintah daerah merupakan semua pengeluaran atas rekening kas daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran daerah nantinya akan mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari: Belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga

### Rasio Efisiensi

Penjelasan dari Trianto, 2015 dalam Riski Ilmawahyu 2021 menjelaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan kegiatan dapat diukur dengan perbandingan rasio antara output dengan input.

$$\text{Rumus Rasio Efisiensi (Halim:2016)} : \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasi}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

### Rasio Efektivitas

Penjelasan dari Noordiawan Deddi, Ayuningtyas, 2016, bahwa efektivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran dengan tujuan yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dimana ukuran efektif tersebut sebagai bentuk refleksi output.

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas (Abdul Halim: 2016)} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektifitas (%)	Keterangan
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber:

**Keppmendagri No.690.900.327 Tahun 1996**

### III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh langsung dari bagian perencanaan dan keuangan atau bendahara pengeluaran daerah, dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### Pengukuran Efektivitas

Untuk menghitung dan mengetahui kinerja pemerintahan daerah (Diskoperin) menggunakan rasio efektivitas dari realisasi anggaran yang telah terlaksana selama empat periode 2017-2020. Dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran belanja lalu dikalikan dengan presentase 100%.

#### Pengukuran Efisiensi

Untuk menghitung dan mengetahui kinerja pemerintah daerah (Diskoperin) dengan menggunakan alat ukur yaitu rasio efisiensi dari realisasi anggaran yang telah terlaksana selama empat periode 2017-2020. Menggunakan cara perbandingan antara realisasi anggaran belanja operasi dengan anggaran belanja.

### IV. HASIL PENELITIAN

Setiap lembaga pemerintah daerah diharuskan dapat mempertanggung jawabkan urusan wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran digunakan sebagai bahan pengukuran atau pengendalian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Cara yang paling relevan digunakan untuk pengukuran antara anggaran dan realisasi ialah menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas.

#### Perhitungan Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria

2017	5.351.371.528	6.785.483.275	79%	Efisien
2018	5.038.103.952	5.380.480.490	94%	Kurang Efisien
2019	5.685.951.281	8.177.734.490	70%	Efisien
2020	5.330.104.785	5.906.641.527	90%	Kurang Efisien

Berikut hasil perhitungan dari realisasi anggaran belanja operasi dengan menggunakan perbandingan realisasi belanja operasi dengan anggaran belanja terhitung dari tahun 2017-2020.

1. Tingkat Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017:

$$\frac{5.351.371.528}{5.038.103.952} \times 100\% = 79\%$$

2. Tingkat Efisiensi Laporan realisasi anggaran Tahun 2018:

$$\frac{5.038.103.952}{5.380.480.490} \times 100\% = 94\%$$

3. Tingkat Efisiensi Laporan realisasi anggaran Tahun 2019:

$$\frac{5.685.951.281}{8.177.734.490} \times 100\% = 70\%$$

4. Tingkat Efisiensi Laporan realisasi anggaran Tahun 2020:

$$\frac{5.330.104.785}{5.906.641.527} \times 100\% = 90\%$$

Dari hasil rasio efisiensi anggaran pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun anggaran 2017, menunjukkan rasio sebesar 79% memperoleh kriteria efisien karena melebihi 60%. Tahun 2018 menunjukkan rasio sebesar 94% dikategorikan kurang efisien, dikarenakan melebihi tingkat rasio sebesar 90%. Tahun 2019 menunjukkan hasil rasio sebesar 70% dikategorikan efisien. Dan Tahun 2020 tingkat rasio menunjukkan sebesar 90%, dan masuk kategori kurang efisien. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio efisiensi penggunaan anggaran belanja operasi selama tahun 2017-2020 pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian disetiap tahunnya mengalami tingkat efisien yang berubah-ubah. Akan tetapi penggunaan anggaran belanja operasi tetap terkendali dalam artian tidak melebihi target yang dianggarkan.

### Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020.

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2017	5.452.951.528	6.785.483.275	80%	Cukup Efektif

2018	5.126.725.952	5.380.480.490	95%	Efektif
2019	7.029.346.931	8.177.734.490	86%	Cukup Efektif
2020	5.691.559.035	5.906.641.527	96%	Efektif

Berikut hasil perhitungan Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran belanja tahun 2017-2020. Dengan menggunakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

1. Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017:

$$\frac{5.452.951.528}{6.785.483.275} \times 100\% = 80\%$$

2. Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018 :

$$\frac{5.126.725.952}{5.380.480.490} \times 100\% = 95\%$$

4. Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019:

$$\frac{7.029.346.931}{8.177.734.490} \times 100\% = 86\%$$

5. Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020:

$$\frac{5.691.559.035}{5.906.641.527} \times 100\% = 96\%$$

Dari hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro dari periode 2017-2020. Penulis menyatakan bahwa penggunaan anggaran belanja pada tahun 2017 sebesar 80% dengan kriteria cukup efektif. Karena melebihi rasio 79%. Tahun 2018 tingkat rasio efektivitas sebesar 95% dikategorikan efektif karena melebihi rasio sebesar 90%. Tahun 2019 penggunaan anggaran belanja sebesar 86% dikategorikan cukup efektif, karena melebihi rasio efektivitas sebesar 80%. Terakhir tahun 2020 penggunaan anggaran belanja sebesar 96%, dikatakan efektif karena melebihi rasio efektivitas sebesar 90%. Hasil analisis anggaran belanja pada (Diskoperin), menunjukkan hasil cukup efektif hampir mencapai rasio 100%.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil penjelasan dan analisis penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat rasio efisiensi realisasi anggaran belanja operasi pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Pemerintahan Kota Metro pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 79% hal ini dikatakan efisien karena melebihi rasio 60%. Sedangkan tahun anggaran 2018 rasio efisiensi menduduki presentase 94%, tahun anggaran 2019 memperoleh rasio 70% dan pada tahun anggaran 2020 rasio efisiensi senilai 90%. Sehingga dapat dilihat

bahwa di setiap tahunnya penggunaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dengan memperoleh perhitungan rata-rata rasio efisiensi senilai 83%, maka dikategorikan cukup efisien karena melebihi rasio presentase sebesar 80%. Pada hasil analisa di atas bahwa semakin tinggi tingkat presentase rasio efisiensi menduduki rasio lebih dari 60%, maka disimpulkan kurang efisien dalam penggunaan dana anggaran pada setiap kebutuhan operasional maupun kegiatan lainnya. Hal ini dikatakan dalam penggunaan dana anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro disimpulkan cukup berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja antara target anggaran yang sudah disusun.

2. Sedangkan tingkat rasio efektifitas dengan perbandingan antara realisasi belanja dengan total anggaran Tahun Anggaran 2017-2020 pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, dapat disimpulkan pada penggunaan anggaran belanja pada taun 2017 dengan rasio 80% sehingga dikatakan cukup efektif karena melebihi rasio presentase 79%, selanjutnya tahun 2018 memperoleh rasio 95% dan tahun 2019 sebesar 86% puncak kenaikan tertinggi dari tahun sebelumnya terjadi pada penggunaan belanja di tahun 2020 dengan memperoleh rasio 96%, sehingga dikategorikan efektif.

Akan tetapi dalam perhitungan rata-rata penggunaan anggaran belanja dari tahun 2017-2020 memperoleh rasio 89% dan dikategorikan cukup efektif karena melebihi rasio 80%. Hal ini dikatakan bahwa dalam penggunaan anggaran belanja dengan perhitungan rasio efektifitas pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro cukup berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja dengan target anggaran dengan target anggaran yang telah ditentukan dan penggunaan anggaran untuk tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi agar mencapai rasio 100%.

## Saran

Setelah melakukan analisis realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro selama periode 2017-2020 penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala pemerintah daerah Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro diharapkan dalam mengelola keuangan belanja daerah dapat mencapai tujuan serta tepat sasaran untuk ditahun berikutnya dan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah, dan mendapatkan hasil efektivitas dengan kriteria sangat efektif dalam merealisasikan anggaran belanja.
2. Disarankan untuk Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro pada pembuatan perencanaan untuk kebutuhan belanja operasi diharapkan dapat mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, supaya anggaran yang disediakan dapat dikelola secara efisien atau memaksimalkan hasilnya agar dapat mencapai tingkat presentase <60%.

## REFERENSI

Anggela Indrakartika Herlen, T., Inggriani, E., & Meily, K. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 74-86.

Halim, Abdul (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat

Halim, Abdul (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.



- Halim, Abdul., & Muhammad Syam Kusufi, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilmawahyu, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Efsiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. *Unmuha Repostory*.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Meiliya Dona, E., & Ayu Lestari, V. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* , 134-144.
- Nordiawan, Deddi, Hertianti, Ayuningtyas. (2016). *Akuntansi sektor publik* (Ed. Ke-2, Cet. Ke-5). Jakarta: Salemba Empat.
- Nuwun Priyono, L. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Partisipasi Anggaran Pada SKPD DISPERDA Kabupaten Magelang. *Economic & Education Journal* , Vol.3, No.1.
- Patiroi, A. (2019). Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Economic Resources*, Vol.2 No.2.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- Pilat Juddy Julian , J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kota Manado Pada Tahun Anggaran 2011-2015 . *Accountability*, 45-56.
- Pratama, M. A. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Satuan Kerja Wilayah 2 Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. Unmuha .
- Republik Indonesia, UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Sulistyawati, YY dan Siti Afidatul Khotijah, *Penerapan Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Operasional Di Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang*, JAFTA, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, 2019.
- Tantri Nusarifa, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Hal 27-37.